

ANALISIS POLA PENYEBARAN KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA

Fajar Restuhadi, Rosalinda, Syaiful Hadi

Kekhususan Manajemen Agribisnis Magister Agribisnis

Kampus Bina Widya No. 30 Simp. Baru Pekanbaru (28293) Telp (0761) 66133, Fax (0761) 66133

Korespondensi: f.restuhadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Poverty is one of the fundamental issues that has become a serious concern of the government. One of the most important thing to support the strategy of poverty reduction is providing of poverty data which is accurate and on target. BPS provides the data and information on poverty as well as indicators related to poverty issues at the district/city in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the pattern of poverty distribution based on clustering the districts and cities in Indonesia and also revealing information based on the patterns formed. This research consisted of 12.072 data cells which is covering 503 districts/cities throughout Indonesia and 24 poverty indicators which is processed using factor analysis and cluster analysis. The results of this research are based on cluster analysis that three interesting clusters will be discussed which were formed the similarity patterns, namely : 1) Cluster I has 11 districts with a correlation of 75,7%, 2) Cluster II has 57 districts with a correlation of 75,5%, and 3) Cluster III has 55 cities with a correlation of 65,4%. Therefore, in formulating the policies, the local governments should notice to the characteristics of region poverty, so that the policies are suitable with the needs of their respective regions.

Keywords : Poverty, Indonesia, Factor Analysis, Cluster Analysis

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. BPS menyajikan kumpulan data dan informasi kemiskinan serta indikator yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penyebaran kemiskinan berdasarkan pengelompokan (*cluster*) kabupaten dan kota se-Indonesia serta menganalisis informasi yang terungkap berdasarkan pola yang terbentuk dari hasil pengelompokan tersebut. Penelitian ini terdiri dari 12.072 sel data yang meliputi 503 kabupaten/kota se-Indonesia dan 24 indikator kemiskinan yang diolah dengan menggunakan faktor analisis dan klaster analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis klaster diperoleh tiga klaster yang menarik untuk dibahas pada penelitian ini yang terbentuk berdasarkan kemiripan pola, yaitu : 1) Klaster I memiliki anggota 11 kabupaten dengan korelasi 75,7%; 2) Klaster II memiliki anggota 57 kabupaten dengan korelasi 75,5%, dan 3) Klaster III memiliki anggota 55 wilayah perkotaan dengan korelasi 65,4%. Oleh sebab itu dalam merumuskan kebijakan, pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah sehingga kebijakan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Kata Kunci : Kemiskinan, Indonesia, Faktor Analisis, Klaster Analisis

I PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam pembangunan di setiap negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan pembangunan yang tidak mengubah kondisi kemiskinan akan menimbulkan masalah sosial yang krusial dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang dapat

ditimbulkan, antara lain : munculnya generasi yang tidak berkualitas dengan kemampuan daya saing rendah, meningkatnya angka kriminalitas, timbulnya pemukiman kumuh, masyarakat gizi buruk, derajat kesehatan rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kemiskinan yang diikuti dengan kondisi serba kekurangan dan keterbelakangan serta kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam masyarakat merupakan tantangan pembangunan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta jiwa atau 11,22% dari total jumlah penduduk. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41% di tahun 2019. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Tempat Tinggal Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
2018	10,14	15,81	25,95	7,02	13,20	9,82
2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41

Sumber : BPS, 2019

Penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan menjadi salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan.

Persentase penduduk miskin dari masing-masing pulau di wilayah Indonesia terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Persentase penduduk miskin terendah pada tahun 2019 berada di Pulau Kalimantan sebesar 5,93% dan yang tertinggi berada di Pulau Maluku dan Papua sebesar 20,91%. Tingginya persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua tidak lepas dari minimnya akses fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kondisi geografis wilayah yang cukup sulit dijangkau serta pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan wilayah Timur Indonesia adalah yang tertinggi, namun jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Pulau Jawa sekitar 12,7 juta jiwa di tahun 2019. Tingginya jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa harus menjadi fokus pemerintah, terutama pada masyarakat miskin di lapisan bawah, seperti buruh serabutan dan buruh tani.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Pulau Tahun 2017-2019

Nama Pulau di Indonesia	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumatera	6.227,25	5.978,80	5.851,29	10,97	10,39	10,03
Jawa	14.789,42	13.340,15	12.723,12	10,01	8,94	8,44
Bali dan Nusa Tenggara	2.124,70	2.051,39	2.046,13	14,71	14,02	13,81
Kalimantan	990,14	982,28	974,19	6,25	6,09	5,93
Sulawesi	2.116,66	2.063,55	2.009,85	11,05	10,64	10,23
Maluku dan Papua	1.523,05	1.533,64	1.504,14	21,45	21,20	20,91

Sumber : BPS, 2019

Tingkat dan sebaran kemiskinan yang bervariasi dari tiap-tiap wilayah di Indonesia pada dasarnya merupakan refleksi dari keterbatasan dan ketidakmampuan penduduk pada suatu wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sekalipun pada tingkatan standar. Ketidakmampuan ini akan memunculkan fenomena ketidakberdayaan yang pada akhirnya akan memperkuat stigma tentang munculnya keterbelakangan dan ketergantungan.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dicermati dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa kemiskinan di Indonesia pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu, perspektif dari sisi agregat ekonomi dalam melihat kemiskinan harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya yang bersifat non ekonomi, termasuk upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas pribadi masyarakat (*human capital*) miskin itu sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan produktif.

Menanggulangi dan mengurangi kemiskinan tersebut harus membutuhkan kekuatan yang besar dan kemauan yang kuat secara konsisten mengangkat orang miskin dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya mempublikasikan kumpulan data terkait dengan kemiskinan, salah satunya adalah Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota Tahun 2019.

Dengan memanfaatkan data yang dipublikasikan oleh BPS tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penyebaran kemiskinan berdasarkan pengelompokan (*cluster*) kabupaten dan kota se-Indonesia serta menganalisis informasi yang terungkap berdasarkan pola yang terbentuk dari hasil pengelompokan.

II METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan menganalisis pola penyebaran kemiskinan kabupaten dan kota se-Indonesia. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni hingga September 2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2019 yang merupakan data publikasi BPS. Data tersebut meliputi : 1) jumlah penduduk miskin, 2) persentase penduduk miskin, 3) indeks kedalaman kemiskinan P1, 4) indeks keparahan kemiskinan P2, 5) garis kemiskinan, 6) tidak mempunyai ijazah, 7) mempunyai ijazah SD atau SLTP, 8) mempunyai ijazah minimal SLTA, 9) angka melek huruf 15-55 tahun, 10) tidak bekerja, 11) bekerja di sektor informal, 12) bekerja di sektor formal, 13) bekerja di sektor pertanian, 14) bekerja bukan di sektor pertanian, 15) pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin, 16) pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk tidak miskin, 17) rumah tangga miskin pengguna air layak, 18) rumah tangga miskin pengguna jamban sendiri/bersama, 19) rumah tangga miskin penerima rastra atau BPNT dan 20) rata-rata rastra yang diterima. Data tambahan terdiri dari : 21) pendapatan asli daerah, 22) dana perimbangan, 23) kepadatan penduduk serta 24) nilai PDRB.

Data yang digunakan adalah sebanyak 24 variabel, diolah menggunakan program excel. Data diseleksi dengan tujuan melihat kelengkapan dan kemampuan variabel dalam menjelaskan sebaran kemiskinan kabupaten/kota. Untuk mempermudah dalam melihat dan mengingat variabel-variabel tersebut, maka variabel dari masing-masing aspek diganti namanya menggunakan X1, X2, dan seterusnya.

Variabel-variabel tersebut kemudian dirata-ratakan menggunakan fungsi geomean, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tidak timpang antara variabel satu dengan lainnya karena data yang diolah memiliki satuan yang berbeda. Fungsi Geomean dituliskan sebagai berikut:

$$GM_{\bar{y}} = \sqrt[n]{y_1 y_2 y_3 \dots y_n}$$

Variabel-variabel yang telah dirata-ratakan dilanjutkan dengan mengolah data menggunakan fungsi LN (Logaritma Natural) yang bertujuan untuk menormalisasikan data. Normalisasi data perlu dilakukan karena masing-masing variabel memiliki satuan yang berbeda. Logaritma Natural adalah logaritma yang berbasis e dimana e adalah 2.718281828459...(dan seterusnya).

Fungsi LN untuk analisis kelompok karena semua data yang ada bernilai positif, apabila rasio nilai sel dibagi rata-rata juga akan selalu positif, sehingga jika dibuatkan *treeview* akan berwarna merah semua dan menjadi tidak menarik. Warna dari hasil *treeview* dibedakan berdasarkan sebaran nilai skor.

$$\text{Nilai Skor} = \text{Ln} \left(\frac{\text{Nilai Sel}}{\text{Nilai rata-rata geometrik se-Indonesia}} \right)$$

Jika nilai skor > rata-rata geometrik, maka akan berwarna merah

Jika nilai skor = rata-rata geometrik, maka akan berwarna hitam

Jika nilai skor < rata-rata geometrik, maka akan berwarna hijau.

Penggunaan *treeview* bertujuan untuk memvisualisasikan pola penyebaran kemiskinan dengan menggunakan warna agar lebih menarik. Untuk menganalisis kelompok (klaster) kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan program SPSS versi 17 dengan faktor analisis.

Tahap awal faktor analisis dilakukan penyaringan terhadap sejumlah variabel hingga diperoleh variabel yang memenuhi syarat untuk dianalisis melalui pengujian dengan menggunakan metode *Bartlett test of sphericity* dan pengukuran MSA (*Measure of Sampling Adequacy*). Jika terdapat variabel yang memiliki nilai MSA < 0,5, maka variabel tersebut tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut atau variabel harus dikeluarkan dari variabel lainnya. Kemudian analisis diulang kembali hingga diperoleh semua variabel memenuhi syarat dengan nilai MSA > 0,5 yang artinya variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut.

Proses selanjutnya adalah analisis klaster, berguna untuk mendeskripsikan fenomena kemiskinan yang terjadi berdasarkan kelompok (klaster) kabupaten dan kota di Indonesia. Alat bantu software yang digunakan adalah *Cluster 3.0*.

Proses pembentukan klaster dilakukan dengan metode hierarki, yakni suatu metode yang membentuk tingkatan tertentu seperti pada struktur pohon karena proses pengklasterannya dilakukan secara bertahap/bertingkat. Metode

hierarki yang dilaksanakan dengan pilihan metode *aveage linkage*, yaitu jarak antara dua kluster dianggap sebagai jarak rata-rata antara semua anggota dalam satu kluster dengan semua anggota kluster lain. Hasil pengklasteran disajikan dalam bentuk dendogram. Dendogram adalah representasi visual dari langkah-langkah dalam kluster analisis yang menunjukkan bagaimana kluster terbentuk dan nilai koefisien jarak pada setiap langkah. Angka di sebelah kanan adalah objek penelitian, dimana objek-objek tersebut dihubungkan oleh garis dengan objek yang lain sehingga pada akhirnya akan membentuk satu kluster.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyeleksian Data

Data yang digunakan sebanyak 24 variabel yang akan diseleksi berdasarkan kelengkapan dan kemampuan variabel tersebut dalam menjelaskan keragaman karakteristik kemiskinan kabupaten dan kota di Indonesia.

Sampel yang digunakan adalah 503 kabupaten dan kota dari 514 seluruh jumlah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Terdapat sebelas kabupaten dan kota dengan data yang tidak lengkap sehingga harus dikeluarkan dari sampel yang akan dianalisis, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota Depok, Kota Yogyakarta, Murung Raya, Kota Palangkaraya dan Yahukimo.

Analisis Faktor (*Factor Analysis*)

Berdasarkan hasil uji *KMO and Bartlett's test* dari 24 variabel diperoleh nilai KMO sebesar 0,764 dengan signifikansi 0,000 seperti yang tertera pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dan sampel yang digunakan memadai untuk dianalisis lebih lanjut.

Proses selanjutnya dilakukan kembali uji MSA, diperoleh hasil bahwa semua variabel memiliki nilai $MSA > 0,5$ artinya bahwa keseluruhan variabel yang ada masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan pola penyebaran kemiskinan kabupaten dan kota di Indonesia.

Tabel 3. Nilai *KMO and Bartlett's test* Terhadap 24 Variabel

KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.764
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square	11905.319
Df	276
Sig.	.000

Sumber : Data Olahan, 2020

Analisis Kelompok (*Cluster Analysis*)

Analisis kelompok menggunakan perangkat *Cluster* 3.0 dengan metode hierarki, berfungsi untuk mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam beberapa klaster berdasarkan variabel kemiskinan dari tiap-tiap kabupaten/kota, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menduga karakteristik atau pola penyebaran kemiskinan dari sekumpulan data tersebut.

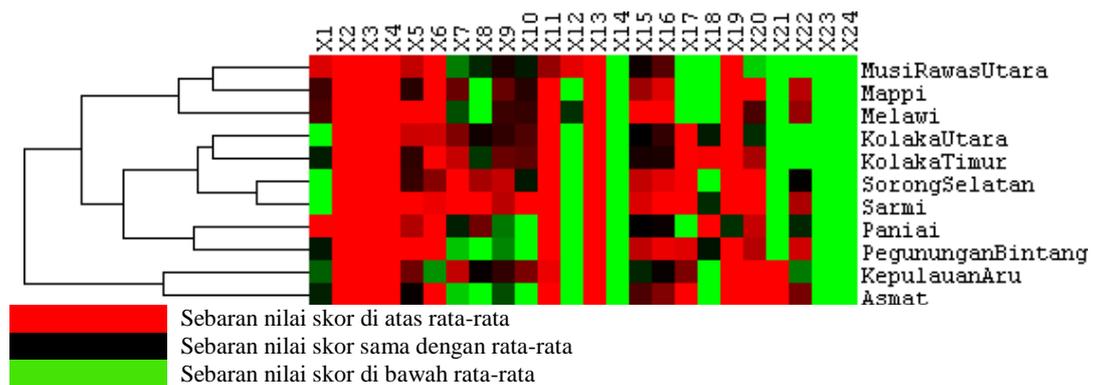
Setelah dilakukan analisis kelompok, pengolahan data selanjutnya dimuat ke dalam perangkat *Treeview* sehingga klaster dan nilai tiap variabel pembentuk klaster lebih mudah diamati. Tampilan gambar dengan analisis *treeview* menunjukkan proses pengklasteran yang telah dilakukan, yakni dengan adanya diagram berupa dendogram yang menampilkan pola penyebaran kemiskinan dari tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Garis mendatar pada bagian kiri dendogram menunjukkan korelasi yang menggambarkan tingkat kemiripan, semakin tinggi nilai korelasi menunjukkan kabupaten/kota tersebut semakin mirip. Dendogram memuat nilai variabel kemiskinan yang diinterpretasikan dengan kotak-kotak berwarna. Setiap kabupaten/kota memiliki 24 kotak yang merupakan 24 variabel kemiskinan yang tersusun secara mendatar sesuai urutannya dan diikuti dengan nama kabupaten/kota di bagian paling kanan dendogram. Jumlah objek yang diamati sebanyak 503 kabupaten/kota, maka dihasilkan sebanyak 12.072 kotak pada dendogram.

Pola warna pada dendogram menunjukkan pola penyebaran kemiskinan yang terbentuk dengan tiga gradasi warna, yaitu merah, hijau dan hitam yang merupakan nilai dari masing-masing variabel dibandingkan terhadap nilai rata-rata. Pola berwarna merah menunjukkan nilai variabel berada di atas rata-rata, warna hijau berarti nilai variabel di bawah rata-rata dan variabel yang berada pada rata-rata ditunjukkan dengan pola berwarna hitam. Pada tahap ini ditentukan batasan pemilihan klaster yang akan dibahas, yaitu nilai korelasi dari kabupaten/kota pada satu klaster minimal 60% yang ditunjukkan pada dendogram.

Klaster I Beranggotakan 11 Kabupaten

Klaster yang ditunjukkan pada Gambar 1 memiliki kemiripan pola dengan nilai korelasi 75,7% yang beranggotakan 11 kabupaten yang menyebar di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat dan Maluku.

Pola yang menonjol dari dendogram Gambar 1 ditunjukkan oleh variabel persentase penduduk miskin (X2), indeks kedalaman kemiskinan P1 (X3), indeks keparahan kemiskinan P2 (X4), garis kemiskinan (X5), tidak mempunyai ijazah (X6) bekerja di sektor informal (X11), bekerja di sektor pertanian (X13) dan persentase rupa miskin penerima rastra atau BPNT (X19) memiliki nilai di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan warna merah. Sedangkan pola yang berwarna hijau ditunjukkan oleh variabel bekerja di sektor formal (X12), bekerja bukan di sektor pertanian (X14), pendapatan asli daerah (X21), kepadatan penduduk (X23) dan nilai PDRB (X24) menandakan bahwa variabel tersebut berada di bawah rata-rata.



Gambar 1. Klaster I Beranggotakan 11 Kabupaten

Kondisi kemiskinan pada klaster I ditandai dengan tingginya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan distribusi pendapatan antar penduduk miskin semakin tidak merata sehingga dapat mengakibatkan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Oleh karena itu, rumah tangga miskin penerima rastra di klaster I meningkat sebagai upaya kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka memperkuat keamanan pangan penduduk miskin di klaster I. Garis kemiskinan berada di atas rata-rata nasional, hal ini berarti biaya yang dikeluarkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanannya tergolong tinggi. Kondisi ini kemungkinan dikarenakan adanya biaya hidup yang cukup besar di daerah tersebut sebagai akibat dari keterbatasan aksesibilitas wilayah yang masih sangat terbatas.

Tingkat pendidikan pada wilayah klaster 1 ini tergolong rendah karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki ijazah atau yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sehingga memberikan salah satu dampak terhadap tingginya angka kemiskinan. Menurut Todaro (2000) bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Tersedianya tenaga kerja terampil dan terdidik sebagai syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Makin tinggi pendidikan seseorang, maka akan mempunyai kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga output barang dan jasa yang dihasilkan lebih banyak dan berkualitas. Besaran output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam perekonomian merupakan indikator untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dinilai dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Makin tinggi PDRB suatu daerah, maka makin tinggi pula pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat menyerap angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan penduduk.

Kabupaten-kabupaten yang berada pada wilayah klaster I memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai PDRB di masing-masing kabupaten dan tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata. Kondisi perekonomian tersebut masih sangat kurang dan belum mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Daerah-daerah yang termasuk ke dalam klaster I merupakan daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius pemerintah dalam pembangunannya. Diperlukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah-daerah yang masuk dalam wilayah ini.

Berdasarkan pada temuan di atas, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan wilayah klaster I lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sektor informal dan pertanian yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian serta dapat menekan angka kemiskinan dikarenakan masyarakat menjadi lebih mandiri. Pemberdayaan UMKM tersebut meliputi : (1) peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), (2) memberikan kemudahan perijinan usaha UMKM, (3) peningkatan permodalan UMKM dengan program perkreditan

dan pembiayaan produktif koperasi, serta (4) peningkatan kualitas teknologi (produksi, pemasaran maupun pengiriman produk). Disamping itu, pemerintah daerah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik agar dapat mendorong dan mempercepat pembangunan serta pengembangan klaster-klaster industri yang berbasis potensi sumber daya alam setempat yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) pada daerah tertinggal.

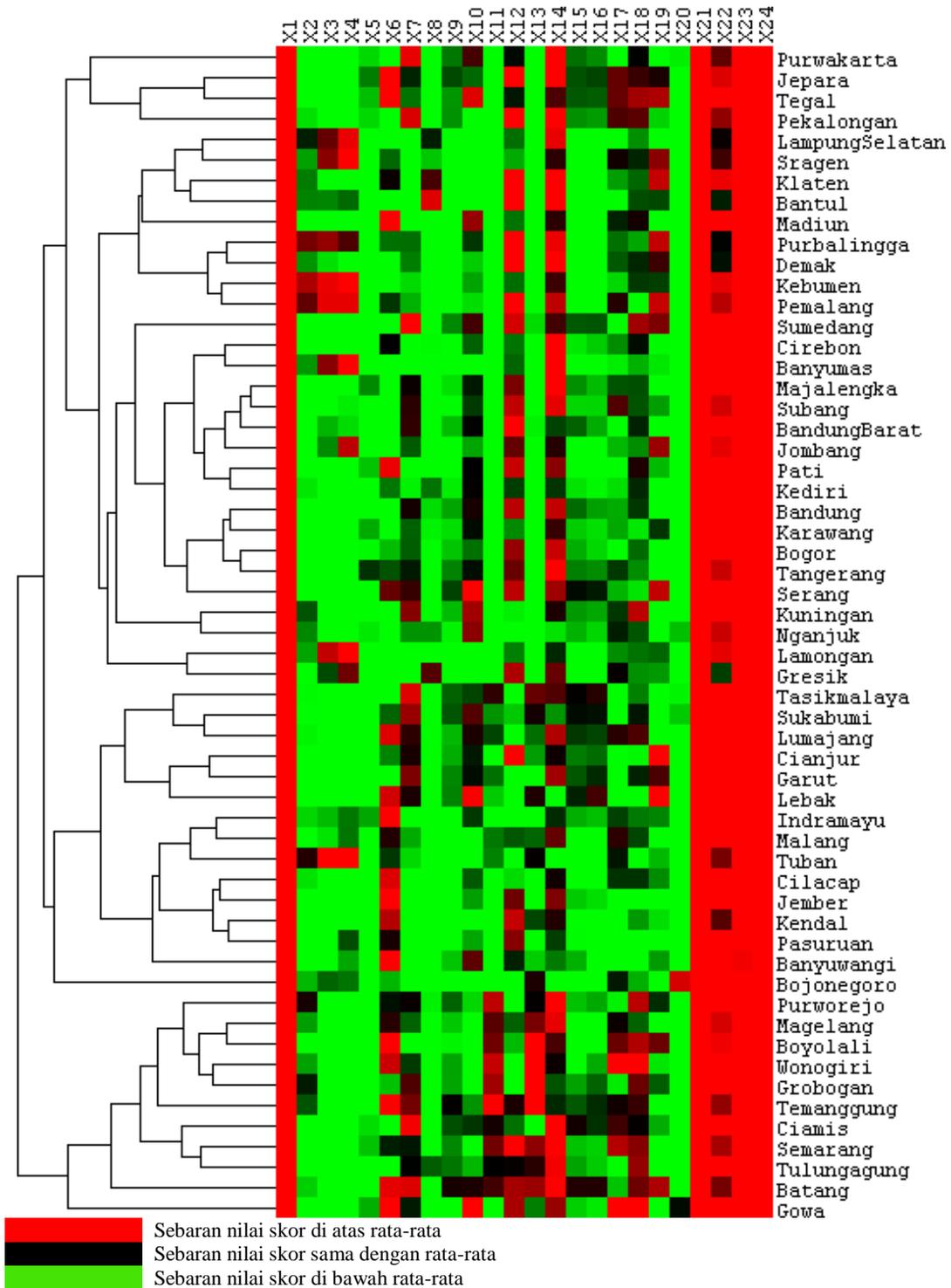
Klaster II Beranggotakan 57 Kabupaten

Anggota wilayah klaster II yang ditunjukkan oleh Gambar 2 hampir seluruhnya didominasi oleh kabupaten yang berada di Pulau Jawa, kecuali Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Gowa dengan nilai korelasi 75,5%.

Pola dominan yang berwarna merah memiliki nilai di atas rata-rata, yaitu jumlah penduduk miskin (X1), pendapatan asli daerah (X21), dana perimbangan (X22), kepadatan penduduk (X23) dan nilai PDRB (X24). Sedangkan pola yang berwarna hijau menunjukkan nilai berada di bawah rata-rata yang ditunjukkan oleh variabel persentase penduduk miskin (X2), indeks kedalaman kemiskinan P1 (X3), indeks keparahan kemiskinan P2 (X4), garis kemiskinan (X5), mempunyai ijazah minimal SLTA (X8), dan rata-rata beras yang diterima (X20).

Tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa karena hampir semua aspek kegiatan terpusat di Pulau Jawa. Perkembangan dan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa terutama infrastruktur antar wilayah jauh lebih pesat dibandingkan dengan pulau lainnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tinggi ini dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan yang pada akhirnya menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Persentase penduduk miskin berada di bawah rata-rata, hal ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil dan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.



Nilai PDRB dari seluruh anggota klaster II berada di atas rata-rata, artinya pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak menurunkan jumlah penduduk yang miskin dan hal ini bertentangan dengan teori yang semestinya. Kondisi ini kemungkinan disebabkan pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh secara langsung

dalam mengentaskan masyarakat miskin dan distribusi pendapatan tidak menyebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang digali oleh pemerintah daerah bersangkutan. Menurut Juliansyah (2018), secara parsial PDRB berpengaruh positif terhadap PAD dimana peningkatan nilai PDRB memberikan dampak meningkatnya PAD. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pengembangan wilayah klaster II lebih dititikberatkan pada pemerataan penyebaran penduduk sehingga kepadatan penduduk tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, antara lain : (1) Melaksanakan program pemerataan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota selain di Pulau Jawa, (2) Menekan pertumbuhan penduduk dengan program KB, dan (3) Menggalakkan program transmigrasi bukan sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat menuju daerah yang jarang penduduknya, melainkan lebih ditekankan pada perannya dalam pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga perlu memberi perhatian khusus untuk menanggulangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin melalui jasa padat modal dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan produk hasil-hasil ekonomi ke seluruh masyarakat. Distribusi yang adil dan merata dari hasil pertumbuhan PDRB akan berdampak pada terciptanya pembangunan di segala sektor lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

Klaster III Beranggotakan 55 Wilayah Perkotaan

Klaster III sebagaimana dilihat pada Gambar 3 cukup menarik untuk dikaji karena 56% dari total 89 wilayah perkotaan yang diamati pada penelitian ini berada pada klaster III dengan nilai korelasi 65,4%.

Pola berwarna merah secara dominan ditunjukkan oleh variabel garis kemiskinan (X5), mempunyai ijazah minimal SLTA (X8), bekerja di sektor formal (X12), bekerja bukan disektor pertanian (X14), ruta miskin pengguna air layak (X17), ruta miskin pengguna jamban sendiri/bersama (X18) dan kepadatan penduduk (X23) yang memiliki nilai di atas rata-rata. Sedangkan pola yang

berwarna hijau memiliki nilai di bawah rata-rata yang dominan ditunjukkan oleh variabel jumlah penduduk miskin (X1), persentase penduduk miskin (X2), indeks kedalaman kemiskinan P1 (X3), indeks keparahan kemiskinan P2 (X4), bekerja di sektor informal (X11) dan bekerja di sektor pertanian (X13).

Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan sebahagian besar pada klaster III berada di bawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin di wilayah perkotaan klaster III semakin membaik karena berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan dan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. Garis kemiskinan berada di atas rata-rata, artinya pengeluaran minimum individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sudah lebih baik.

Kemiskinan pada wilayah perkotaan lebih disebabkan karena tingginya kepadatan penduduk. Menurut teori Maltus, semakin padat jumlah penduduk tiap 1 km² dapat mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan mempersempit persediaan lahan hunian serta lahan pakai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemiskinan dimana masyarakat akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan akan mendorong tingginya angka pengangguran sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keadaan pendidikan secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada klaster III, masyarakat yang lulus SLTA berada di atas rata-rata. Keadaan ini menggambarkan tingginya tingkat pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu faktor pendorong pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kualitas sumberdaya manusianya. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Suryawati, 2005).

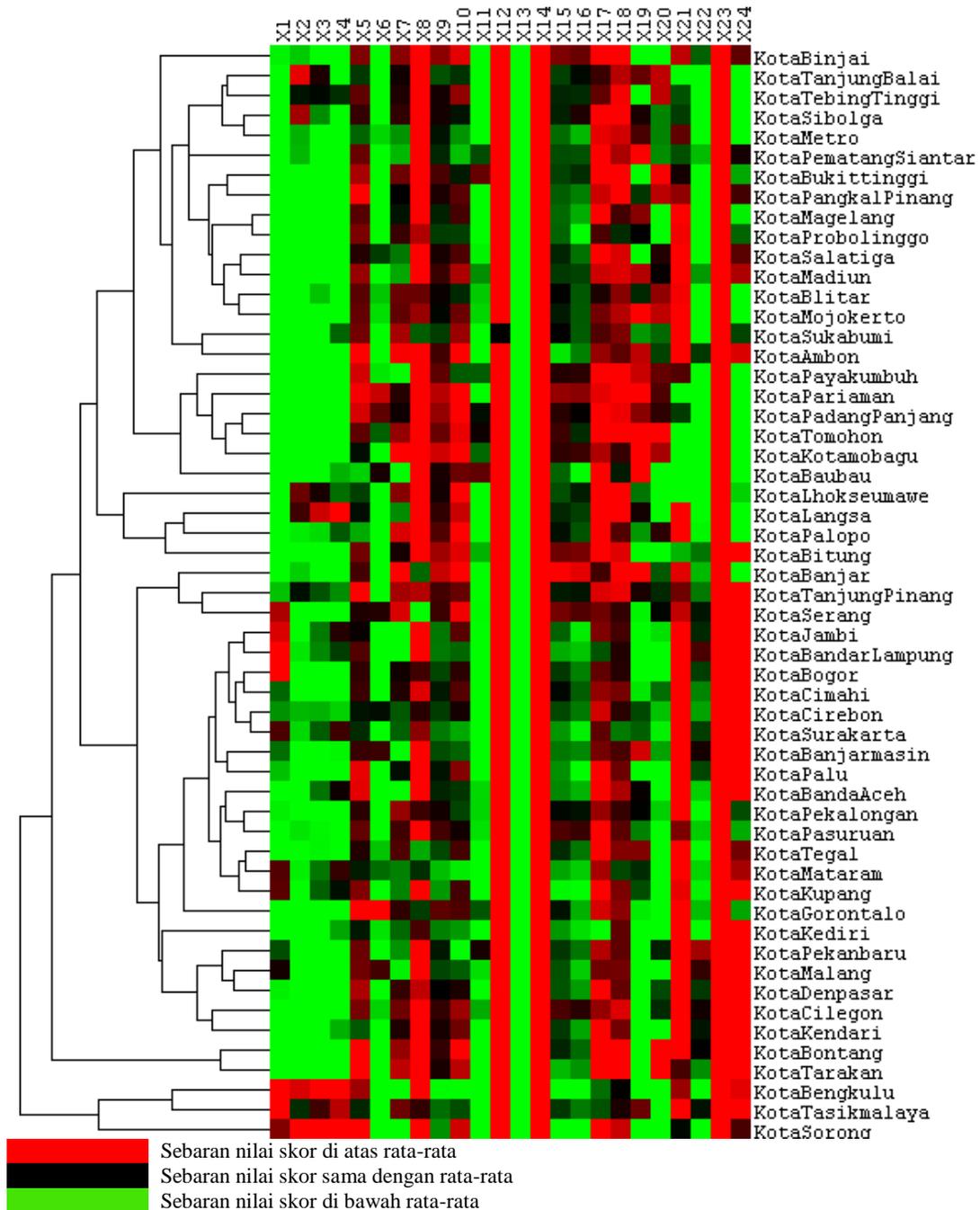
Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa serta perubahan

nama dan pemindahan ibukota pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penduduk di klaster III dominan bekerja di sektor formal dan non pertanian daripada bekerja di sektor informal dan pertanian.

Menurut Perkins et. al dalam Chrismardani (2018) menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sektor formal perkotaan, sektor informal perkotaan dan pasar kerja pedesaan. Sektor formal perkotaan merupakan pasar kerja yang diinginkan oleh setiap pekerja. Pada pasar ini terdapat sektor pemerintah dan perusahaan besar seperti bank, perusahaan asuransi, pabrik dan perdagangan. Masyarakat dapat bekerja pada sektor ini dengan fasilitas yang lebih modern dengan tingkat upah yang paling tinggi dikarenakan mereka memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menengah dari berbagai penjuru daerah.

Kurangnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal di perkotaan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena sektor informal ini sejatinya dapat menampung tenaga kerja yang tidak berhasil di sektor formal sebagai akibat output dan daya tampung sektor formal terlalu kecil untuk tenaga kerja yang begitu banyak di perkotaan. Sektor informal perlu dilembagakan atau diakui keberadaannya untuk selanjutnya dipromosikan sebagai salah satu sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja perkotaan.

Kebijakan pengembangan wilayah klaster III lebih dititikberatkan pada penguatan dan pengembangan sektor informal, antara lain : 1) pemerintah daerah perlu memberikan dukungan pelatihan, magang dan kursus kepada pekerja sektor informal untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya, 2) pemerintah daerah memberikan kebijakan khusus dalam pemberian modal usaha, berupa kredit lunak untuk unit-unit usaha kecil sehingga dapat berkembang, 3) pemerintah daerah memfasilitasi pelaku sektor informal dalam mengembangkan jaringan pemasarannya sehingga produk lebih dikenal dan laku di pasaran, serta 4) penyediaan infrastruktur dan lokasi kerja yang menunjang seperti pembentukan kawasan industri kecil.



Gambar 3. Kluster III Beranggotakan 55 Wilayah Perkotaan

IV KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kluster diperoleh tiga kluster yang terbentuk berdasarkan kemiripan pola, yaitu : 1) Kluster I beranggotakan 11 kabupaten dengan korelasi sebesar 75,7%; Kluster II beranggotakan 57 kabupaten dengan nilai korelasi 75,5% dan 3) Kluster III beranggotakan 55 wilayah perkotaan dengan kemiripan pola sebesar 65,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. *Data dan informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2015. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Bappenas, Jakarta.
- Chrismardani, Y. dan B. Satriawan, 2018. Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Bangkalan, dalam *Media Trend Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura.
- Haughton, Jonathan Dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliansyah, H dan Sulkadria, 2018. Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue, dalam *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol 01 No 2, Agustus 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Rifai Ahmad, dkk. 2012. Profil Karakteristik Sosial Ekonomi dan Produksi Pangan Utama dan Hubungannya dengan Kemiskinan Indonesia, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sumodiningrat, G, 1988. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Riant Nugroho D., 2005. *Membangun Indonesia Emas : Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara - Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar)*, Erlangga, Jakarta.